



ANALISIS SWOT TERHADAP PROGRAM KLA (KABUPATEN LAYAK ANAK) DI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BEKASI

Fany, Indra Aditya, Dewi Noor Azijah

Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Singaperbangsa

Abstrak

Program Kabupaten Layak Anak (KLA) merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan mewujudkan lingkungan yang menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak secara terpadu melalui sinergi berbagai pemangku kepentingan. Kabupaten Bekasi telah memperoleh predikat Madya pada tahun 2025, namun implementasi program masih menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan evaluasi strategis. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor internal dan eksternal yang memengaruhi realisasi Program Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Bekasi serta merumuskan strategi pengembangannya menggunakan analisis SWOT. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD), serta studi dokumen. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan yang dipadukan dengan analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan implementasi Program KLA meliputi komitmen pemerintah daerah, dukungan regulasi, kelembagaan, serta kolaborasi lintas sektor. Kelemahannya meliputi masih tingginya angka stunting, koordinasi antarperangkat daerah yang belum optimal, dan belum meratanya fasilitas ramah anak. Peluang berasal dari dukungan kebijakan nasional, perkembangan teknologi informasi, serta potensi kemitraan dengan dunia usaha dan masyarakat. Sementara itu, ancaman meliputi meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak, perundungan, kekerasan berbasis digital, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap perlindungan anak. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kolaborasi, optimalisasi teknologi, peningkatan partisipasi masyarakat, dan pemerataan pelayanan berbasis hak anak guna mendukung keberlanjutan implementasi Program Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Bekasi.

Kata Kunci: Kabupaten Layak Anak, SWOT, perlindungan anak, Kabupaten Bekasi.

PENDAHULUAN

Pemenuhan hak anak merupakan salah satu indikator penting dalam pembangunan daerah yang berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah Indonesia telah mengembangkan kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) sebagai strategi untuk mewujudkan sistem pembangunan berbasis hak anak melalui penguatan kelembagaan serta pemenuhan lima klaster hak anak yang meliputi hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan serta pemanfaatan waktu luang, dan perlindungan khusus. Implementasi kebijakan ini menuntut keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga masyarakat, maupun masyarakat itu sendiri, sehingga pemenuhan hak anak tidak hanya menjadi tanggung jawab satu institusi, tetapi menjadi tanggung jawab bersama.

Kabupaten Bekasi merupakan salah satu daerah yang telah menetapkan kebijakan penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Bekasi juga telah membentuk Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak serta melibatkan berbagai organisasi perangkat daerah dalam pelaksanaan indikator KLA. Berbagai upaya tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas perlindungan dan pemenuhan hak anak. Namun demikian, keberhasilan implementasi suatu kebijakan tidak hanya diukur dari tersedianya regulasi maupun kelembagaan, tetapi juga dari

kemampuan pemerintah daerah dalam mengatasi berbagai permasalahan yang masih dihadapi anak di lapangan.

Berbagai permasalahan yang berkaitan dengan perlindungan anak masih ditemukan di Kabupaten Bekasi. Data UPTD PPA menunjukkan bahwa sepanjang Januari–Juni 2024 tercatat 150 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk kasus penelantaran, kekerasan dalam rumah tangga, dan eksploitasi anak. Selain itu, masih ditemukan praktik eksploitasi ekonomi terhadap anak yang menunjukkan bahwa pemenuhan hak anak belum sepenuhnya terlaksana secara optimal. Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah daerah karena dapat memengaruhi keberhasilan implementasi Program Kabupaten Layak Anak.

Di sisi lain, Kabupaten Bekasi juga memiliki berbagai potensi yang dapat mendukung keberhasilan program. Keberadaan Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD), Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak, Forum Anak Daerah, serta pengembangan sistem informasi berbasis digital menunjukkan adanya penguatan kelembagaan yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efektivitas koordinasi, pengawasan, serta monitoring pelaksanaan program. Potensi tersebut menjadi modal penting bagi pemerintah daerah dalam mempercepat pencapaian indikator Kabupaten Layak Anak secara berkelanjutan.

Meskipun demikian, hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa implementasi Program Kabupaten Layak Anak masih menghadapi berbagai kendala. Koordinasi lintas perangkat daerah

belum sepenuhnya terintegrasi, kualitas data pendukung antarorganisasi belum seragam, serta tingkat pemahaman terhadap indikator Kabupaten Layak Anak masih berbeda di setiap perangkat daerah. Selain itu, rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap isu perlindungan anak, masih ditemukannya kasus kekerasan dan perundungan, serta dinamika sosial yang berkembang menjadi faktor eksternal yang turut memengaruhi efektivitas implementasi program.

Berbagai penelitian mengenai implementasi Kabupaten/Kota Layak Anak telah banyak dilakukan di berbagai daerah. Penelitian Rahmawati dan Wahyuni (2024) menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Klaten masih menghadapi kendala dalam pemenuhan hak anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Sementara itu, Ratna Dewi dan Sri Dwi Friwanti (2023) menjelaskan bahwa keberhasilan pembentukan Kabupaten/Kota Layak Anak dipengaruhi oleh komitmen pemerintah daerah, koordinasi lintas sektor, serta partisipasi masyarakat. Penelitian Sani dan Dwiono (2025) juga menegaskan bahwa implementasi kebijakan Kabupaten Layak Anak harus didukung oleh sistem perlindungan hak anak yang komprehensif. Selain itu, Jehudat, Novaria, dan Soesiantoro (2024) mengemukakan bahwa pendekatan *collaborative governance* menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan KLA melalui sinergi antar pemangku kepentingan. Meskipun demikian, penelitian yang secara khusus menganalisis realisasi Program Kabupaten Layak Anak menggunakan pendekatan SWOT pada konteks Kabupaten Bekasi masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang memengaruhi

implementasi Program KLA serta merumuskan strategi pengembangannya melalui analisis SWOT.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis realisasi Program Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Bekasi menggunakan pendekatan SWOT. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi aktual implementasi program sekaligus menjadi dasar dalam penyusunan strategi untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Bekasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A) Analisis Faktor Internal: Strength (Kekuatan)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi Program Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Bekasi didukung oleh sejumlah kekuatan internal yang menjadi modal penting dalam pelaksanaan kebijakan. Kekuatan tersebut tidak hanya tercermin dari aspek kelembagaan, tetapi juga dari komitmen pemerintah daerah, dukungan regulasi, penyediaan sarana ramah anak, serta keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam mendukung pemenuhan hak anak. Temuan ini menunjukkan bahwa implementasi Program KLA di Kabupaten Bekasi telah memiliki fondasi kelembagaan yang relatif baik sehingga mampu mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan program secara berkelanjutan.

Salah satu kekuatan utama adalah keberhasilan Pemerintah Kabupaten Bekasi memperoleh Predikat Madya pada Anugerah Kabupaten/Kota Layak Anak Tahun 2025. Capaian tersebut menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan periode sebelumnya sekaligus menjadi indikator bahwa pemerintah daerah telah mampu memenuhi sebagian besar indikator penilaian KLA yang meliputi penguatan

kelembagaan serta lima klaster hak anak. Penghargaan tersebut tidak hanya memiliki nilai simbolis, tetapi juga mencerminkan meningkatnya kapasitas pemerintah daerah dalam mengintegrasikan kebijakan perlindungan anak ke dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Informasi dari DP3A menunjukkan bahwa peningkatan predikat tersebut dicapai melalui penguatan koordinasi lintas sektor, pelaksanaan berbagai program pemenuhan hak anak, serta komitmen seluruh perangkat daerah dalam memenuhi indikator KLA.

Keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa komitmen pemerintah daerah merupakan faktor penting dalam implementasi Program KLA. Temuan ini sejalan dengan penelitian Nurhanisah dan Maifizar (2025) yang menjelaskan bahwa keberhasilan penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak sangat dipengaruhi oleh konsistensi pemerintah daerah dalam memperkuat koordinasi lintas sektor, menjalankan program secara berkelanjutan, dan memenuhi indikator-indikator KLA. Dengan demikian, predikat Madya tidak hanya menunjukkan keberhasilan administratif, tetapi juga menjadi bukti adanya peningkatan tata kelola kebijakan perlindungan anak di Kabupaten Bekasi.

Kekuatan berikutnya terlihat dari tersedianya landasan hukum yang memberikan arah pelaksanaan Program KLA, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak. Regulasi tersebut memberikan kepastian mengenai pembagian peran perangkat daerah, mekanisme koordinasi, serta tanggung jawab masing-masing pemangku kepentingan dalam mendukung pemenuhan hak anak. Keberadaan regulasi daerah juga memperkuat legitimasi pelaksanaan program sehingga implementasi KLA

tidak bergantung pada kebijakan sektoral, melainkan menjadi bagian dari kebijakan pembangunan daerah secara menyeluruh.

Selain aspek regulasi, penelitian ini menemukan bahwa Kabupaten Bekasi telah mengembangkan berbagai sarana dan fasilitas yang mendukung terwujudnya lingkungan ramah anak. Penyediaan ruang bermain anak, rumah pintar, ruang laktasi, serta fasilitas publik lainnya menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan tumbuh kembang anak melalui penyediaan ruang yang aman, nyaman, dan inklusif. Ketersediaan fasilitas tersebut menjadi bentuk implementasi nyata kebijakan KLA karena memberikan akses yang lebih luas bagi anak untuk memperoleh hak atas pendidikan, rekreasi, serta lingkungan yang mendukung perkembangan fisik maupun psikologis.

Aspek lain yang menjadi kekuatan adalah keterlibatan dunia usaha melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR). Sebagai kawasan industri terbesar di Indonesia, Kabupaten Bekasi memiliki potensi kolaborasi yang besar antara pemerintah daerah dengan sektor swasta. Penelitian menunjukkan bahwa beberapa perusahaan telah berpartisipasi dalam mendukung penyediaan fasilitas pendidikan, bantuan sosial, serta program yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup anak. Keterlibatan sektor swasta memperlihatkan bahwa penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak tidak hanya bergantung pada kapasitas pemerintah daerah, tetapi juga didukung oleh kontribusi berbagai aktor pembangunan. Kondisi tersebut sejalan dengan prinsip *collaborative governance* yang menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam menyelesaikan persoalan publik secara bersama-sama.

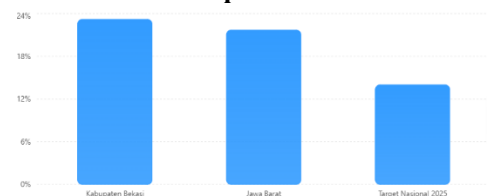
Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, dapat dipahami bahwa kekuatan utama Program Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Bekasi terletak pada kombinasi antara komitmen kelembagaan, dukungan regulasi, penyediaan fasilitas ramah anak, serta kolaborasi lintas sektor. Kombinasi faktor-faktor tersebut menjadi modal strategis bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas implementasi program sekaligus memperkuat posisi Kabupaten Bekasi dalam mencapai target pembangunan yang berorientasi pada pemenuhan hak dan perlindungan anak. Namun demikian, kekuatan tersebut perlu terus dipertahankan melalui evaluasi berkelanjutan agar tidak hanya menghasilkan capaian administratif berupa penghargaan, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas hidup anak di Kabupaten Bekasi.

B) Analisis Faktor Internal: Weakness (Kelemahan)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Kabupaten Bekasi telah mengalami peningkatan capaian dalam penyelenggaraan Program Kabupaten Layak Anak (KLA), masih terdapat sejumlah kelemahan internal yang berpotensi menghambat optimalisasi implementasi program. Kelemahan tersebut terutama berkaitan dengan belum optimalnya pemenuhan hak kesehatan anak, koordinasi lintas sektor yang belum sepenuhnya terintegrasi, serta belum meratanya penyediaan infrastruktur ramah anak di seluruh wilayah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan Program KLA masih menghadapi tantangan pada aspek implementasi sehingga memerlukan penguatan tata kelola dan kualitas pelaksanaan program agar manfaatnya dapat dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat.

Salah satu kelemahan utama yang ditemukan dalam penelitian ini adalah masih tingginya prevalensi stunting di Kabupaten Bekasi. Dalam kerangka Kabupaten Layak Anak, pemenuhan hak atas kesehatan dasar dan kesejahteraan merupakan salah satu klaster utama yang menjadi indikator penilaian. Tingginya angka stunting menunjukkan bahwa intervensi pemerintah dalam aspek pemenuhan gizi, pelayanan kesehatan ibu dan anak, sanitasi, serta pola pengasuhan belum sepenuhnya mencapai hasil yang diharapkan. Berdasarkan data pemerintah daerah, prevalensi stunting di Kabupaten Bekasi pada tahun 2023 mencapai 23,2%, lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Jawa Barat dan masih berada di atas target nasional. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa upaya percepatan penurunan stunting masih memerlukan penguatan melalui pendekatan lintas sektor yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Bagan 1. Diagram Prevelensi Angka Stunting di Kabupaten Bekasi



Sumber : Olahan Peneliti dalam DP3A Kabupaten Bekasi (2026)

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan Program KLA tidak cukup diukur melalui capaian penghargaan, tetapi juga harus tercermin pada peningkatan kualitas hidup anak. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Bakhri, Herawati, dan Nuroniyah (2020) yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi Kabupaten Layak Anak sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah daerah dalam

menyelesaikan persoalan mendasar yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak, khususnya pada aspek kesehatan dan kesejahteraan. Dengan demikian, penanganan stunting perlu diposisikan sebagai prioritas strategis karena berkaitan langsung dengan kualitas generasi masa depan sekaligus menjadi indikator keberhasilan pembangunan daerah yang berorientasi pada hak anak.

Selain aspek kesehatan, penelitian ini juga menemukan bahwa koordinasi lintas perangkat daerah masih menjadi kelemahan dalam pelaksanaan Program KLA. Meskipun telah dibentuk Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak yang melibatkan berbagai organisasi perangkat daerah, pelaksanaan program di lapangan belum sepenuhnya berjalan secara terintegrasi. Perbedaan pemahaman terhadap indikator KLA, belum optimalnya sinkronisasi program antarinstansi, serta belum seragamnya sistem pengelolaan data menyebabkan implementasi kebijakan masih berlangsung secara sektoral. Kondisi tersebut mengakibatkan proses monitoring dan evaluasi belum mampu menghasilkan informasi yang komprehensif sebagai dasar pengambilan keputusan.

Temuan ini memperlihatkan bahwa tantangan implementasi tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan kebijakan, tetapi juga menyangkut efektivitas tata kelola pemerintahan. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Elizabeth dan Hidayat (2016) yang menjelaskan bahwa implementasi Program Kota Layak Anak sangat dipengaruhi oleh kualitas komunikasi, koordinasi antar pelaksana kebijakan, serta komitmen organisasi dalam menjalankan program secara terpadu. Tanpa koordinasi yang efektif, berbagai program perlindungan anak berpotensi berjalan sendiri-sendiri sehingga tujuan pembangunan yang berorientasi pada

pemenuhan hak anak menjadi sulit tercapai secara optimal.

Kelemahan lainnya adalah belum meratanya penyediaan infrastruktur ramah anak di seluruh wilayah Kabupaten Bekasi. Penelitian menunjukkan bahwa beberapa fasilitas seperti ruang bermain anak, rumah pintar, dan ruang publik ramah anak telah tersedia di sejumlah lokasi, namun distribusinya belum merata dan pemeliharaannya masih memerlukan perhatian lebih. Kondisi tersebut menyebabkan akses anak terhadap fasilitas pendukung tumbuh kembang belum sepenuhnya setara, terutama bagi anak yang berada di wilayah dengan keterbatasan sarana publik. Infrastruktur yang belum merata juga berpotensi menimbulkan kesenjangan dalam pemenuhan hak anak antarwilayah.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa kelemahan Program Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Bekasi lebih banyak berkaitan dengan kualitas implementasi dibandingkan aspek regulasi. Pemerintah daerah telah memiliki dasar hukum, kelembagaan, dan komitmen yang memadai, namun efektivitas pelaksanaan masih dipengaruhi oleh permasalahan stunting, koordinasi lintas sektor yang belum optimal, serta pemerataan infrastruktur ramah anak. Oleh karena itu, penguatan sinergi antarperangkat daerah, peningkatan kualitas sistem koordinasi, dan pemerataan pelayanan berbasis hak anak menjadi langkah strategis yang perlu diprioritaskan agar implementasi Program Kabupaten Layak Anak tidak hanya memenuhi indikator administratif, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak di Kabupaten Bekasi.

C) Analisis Faktor Eksternal: Opportunity (Peluang)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Bekasi memiliki berbagai peluang eksternal yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat efektivitas penyelenggaraan program. Peluang tersebut berasal dari dukungan kebijakan pemerintah pusat, perkembangan teknologi informasi, potensi kolaborasi dengan sektor swasta dan masyarakat, serta meningkatnya perhatian berbagai pihak terhadap isu perlindungan dan pemenuhan hak anak. Keberadaan peluang tersebut menjadi faktor strategis yang dapat mendukung pemerintah daerah dalam mengatasi berbagai kendala implementasi sekaligus mempercepat pencapaian indikator Kabupaten Layak Anak secara berkelanjutan.

Salah satu peluang yang paling signifikan adalah adanya dukungan kebijakan nasional yang menempatkan pemenuhan hak anak sebagai bagian dari agenda pembangunan berkelanjutan. Pemerintah melalui berbagai regulasi, seperti Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak dan berbagai kebijakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, memberikan arah yang jelas bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan sistem perlindungan anak yang terintegrasi. Dukungan regulasi tersebut membuka peluang bagi Kabupaten Bekasi untuk memperoleh pembinaan, pendampingan, serta evaluasi secara berkala sehingga kualitas implementasi Program KLA dapat terus ditingkatkan. Selain itu, adanya mekanisme penilaian tahunan mendorong pemerintah daerah untuk terus melakukan inovasi dalam memenuhi indikator Kabupaten Layak Anak.

Peluang berikutnya berasal dari karakteristik Kabupaten Bekasi sebagai salah satu kawasan industri terbesar di Indonesia yang memiliki potensi besar dalam membangun kemitraan dengan dunia usaha. Keberadaan ribuan perusahaan membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan kolaborasi melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang berorientasi pada pemenuhan hak anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejumlah perusahaan telah berkontribusi dalam mendukung implementasi Program Kabupaten Layak Anak melalui berbagai program sosial. PT Sugity Creatives pada tahun 2026 menyalurkan 4.000 buku kepada pelajar di Kabupaten Bekasi sebagai upaya meningkatkan literasi dan mendukung hak anak atas pendidikan. FIFGROUP Cabang Cikarang 2 melalui program CSR memberikan beasiswa kepada siswa berprestasi, yang berkontribusi terhadap pemenuhan hak anak di bidang pendidikan. Selain itu, PT Hyundai Motor Manufacturing Indonesia (HMMI) pada periode 2023–2024 mengembangkan Rumah Taman Baca, perpustakaan keliling, dan berbagai program pendidikan masyarakat yang bertujuan memperluas akses pendidikan dan mendukung perkembangan anak. Berbagai bentuk kontribusi tersebut menunjukkan bahwa sektor swasta memiliki peran strategis dalam mendukung implementasi Program Kabupaten Layak Anak, tidak hanya sebagai penyedia bantuan sosial, tetapi juga sebagai mitra pembangunan yang berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan kesejahteraan anak di Kabupaten Bekasi. Potensi kolaborasi ini masih dapat dioptimalkan melalui kemitraan yang lebih terstruktur dan berkelanjutan agar pelaksanaan Program KLA semakin efektif.

Selain sektor swasta, perkembangan teknologi informasi juga menjadi peluang yang semakin penting dalam meningkatkan efektivitas implementasi Program KLA. Pemanfaatan sistem pemerintahan berbasis elektronik, digitalisasi pelayanan publik, serta pengembangan sistem informasi perlindungan anak memungkinkan proses pelaporan, pendataan, koordinasi, hingga monitoring program dilakukan secara lebih cepat, akurat, dan transparan. Penggunaan teknologi informasi juga dapat memperkuat koordinasi antarperangkat daerah melalui integrasi data sehingga proses pengambilan kebijakan menjadi lebih responsif terhadap berbagai permasalahan anak yang berkembang di masyarakat. Sejalan dengan pendapat Hardjaloka (2014), penerapan *e-government* mampu meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui efisiensi pelayanan publik, transparansi, serta penguatan koordinasi antarinstitusi. Oleh karena itu, optimalisasi digitalisasi menjadi peluang strategis bagi Kabupaten Bekasi untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Program KLA.

Peluang lainnya adalah meningkatnya partisipasi masyarakat dan berbagai lembaga nonpemerintah dalam isu perlindungan anak. Keberadaan Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD), Forum Anak, organisasi masyarakat, lembaga pendidikan, hingga media massa memberikan ruang kolaborasi yang lebih luas dalam membangun lingkungan yang ramah anak. Partisipasi tersebut tidak hanya mendukung pelaksanaan program pemerintah, tetapi juga berperan dalam meningkatkan edukasi, pengawasan, serta kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan hak anak. Temuan penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan berbagai aktor tersebut menjadi faktor pendukung dalam memperkuat implementasi Program KLA

karena mampu menciptakan sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi anak. Kondisi ini sejalan dengan konsep *collaborative governance* yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash (2008), bahwa keberhasilan penyelesaian masalah publik memerlukan kolaborasi antarpemangku kepentingan yang memiliki tujuan bersama serta didukung oleh komitmen, kepercayaan, dan koordinasi yang berkelanjutan.

Secara keseluruhan, peluang eksternal yang dimiliki Kabupaten Bekasi menunjukkan bahwa implementasi Program Kabupaten Layak Anak memiliki prospek yang cukup baik untuk terus dikembangkan. Dukungan kebijakan nasional, potensi kemitraan dengan sektor industri, pemanfaatan teknologi informasi, serta meningkatnya partisipasi berbagai pemangku kepentingan merupakan modal penting yang dapat dimanfaatkan pemerintah daerah untuk memperkuat efektivitas penyelenggaraan Program KLA. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan seluruh peluang tersebut melalui penguatan kolaborasi lintas sektor, inovasi pelayanan berbasis digital, serta peningkatan kemitraan dengan dunia usaha dan masyarakat. Langkah tersebut diharapkan mampu mempercepat pencapaian indikator Kabupaten Layak Anak sekaligus mewujudkan lingkungan yang lebih aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

D) Analisis Faktor Eksternal: Threat (Ancaman)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa selain memiliki berbagai peluang yang dapat dimanfaatkan, implementasi Program Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Bekasi juga dihadapkan pada sejumlah ancaman eksternal yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan program. Ancaman tersebut

berasal dari meningkatnya berbagai permasalahan sosial yang melibatkan anak, perubahan dinamika masyarakat, perkembangan teknologi informasi yang belum sepenuhnya diimbangi dengan literasi digital, serta tingginya kompleksitas persoalan perlindungan anak di wilayah Kabupaten Bekasi. Berbagai kondisi tersebut menjadi tantangan yang harus diantisipasi melalui kebijakan yang adaptif dan kolaborasi lintas sektor agar penyelenggaraan Program KLA tetap berjalan secara efektif.

Salah satu ancaman utama yang ditemukan dalam penelitian ini adalah masih tingginya kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Bekasi. Meskipun pemerintah daerah telah melaksanakan berbagai program perlindungan anak melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), serta Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak, berbagai bentuk kekerasan seperti kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran, dan eksploitasi anak masih terus terjadi. Berdasarkan data UPTD PPA Kabupaten Bekasi, pada periode Januari–Juni 2024 tercatat 150 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, dengan 90 kasus di antaranya menimpa anak. Jumlah tersebut terus meningkat, di mana hingga November 2024 tercatat 267 korban yang mayoritas merupakan perempuan dan anak. Selanjutnya, hingga Oktober 2025 tercatat 292 kasus, dengan 174 kasus melibatkan anak sebagai korban. Peningkatan jumlah kasus tersebut menunjukkan bahwa upaya preventif, edukatif, dan perlindungan yang telah dilakukan belum sepenuhnya mampu menekan angka kekerasan terhadap anak. Kondisi ini menjadi ancaman serius terhadap keberhasilan implementasi Program Kabupaten Layak Anak karena secara langsung memengaruhi

pemenuhan indikator kluster perlindungan khusus sekaligus mencerminkan bahwa sistem perlindungan anak di tingkat keluarga, masyarakat, dan lingkungan sosial masih memerlukan penguatan secara berkelanjutan.

Selain kekerasan terhadap anak, penelitian ini juga menemukan bahwa praktik perundungan (*bullying*) di lingkungan pendidikan masih menjadi persoalan yang memerlukan perhatian serius. Perundungan tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik dan psikologis anak, tetapi juga berpotensi mengganggu proses belajar, perkembangan sosial, serta pembentukan karakter. Dalam konteks Kabupaten Layak Anak, fenomena tersebut bertentangan dengan prinsip penyelenggaraan satuan pendidikan yang aman, nyaman, inklusif, dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Apabila tidak ditangani secara komprehensif melalui penguatan pendidikan karakter, sistem pelaporan yang responsif, serta keterlibatan sekolah dan keluarga, maka praktik perundungan dapat menghambat terwujudnya lingkungan yang ramah anak.

Ancaman lainnya berkaitan dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat. Kemudahan akses internet dan penggunaan media sosial memberikan berbagai manfaat bagi anak dalam memperoleh informasi dan mengembangkan kemampuan belajar.

Namun, di sisi lain perkembangan tersebut juga meningkatkan risiko munculnya berbagai bentuk kekerasan berbasis digital, seperti *cyberbullying*, kekerasan gender berbasis online (KGBO), eksploitasi seksual daring, penyebaran konten negatif, serta berbagai bentuk kejahatan siber yang melibatkan anak sebagai korban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meningkatnya

kasus kekerasan berbasis digital menjadi tantangan baru bagi pemerintah daerah karena memerlukan pendekatan perlindungan yang lebih adaptif dibandingkan dengan bentuk kekerasan konvensional. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan anak pada era digital tidak hanya memerlukan penegakan hukum, tetapi juga peningkatan literasi digital bagi anak, orang tua, guru, serta masyarakat secara luas.

Selain faktor tersebut, pertumbuhan penduduk dan urbanisasi di Kabupaten Bekasi turut menjadi ancaman terhadap implementasi Program KLA. Sebagai kawasan industri yang terus berkembang, Kabupaten Bekasi menjadi tujuan perpindahan penduduk dari berbagai daerah. Kondisi tersebut menyebabkan meningkatnya kebutuhan terhadap pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, ruang terbuka hijau, serta fasilitas ramah anak. Apabila peningkatan jumlah penduduk tidak diimbangi dengan pemerataan penyediaan layanan publik yang memadai, maka kesenjangan akses terhadap pemenuhan hak anak berpotensi semakin meningkat. Dengan demikian, pemerintah daerah dituntut untuk mampu merencanakan pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek perlindungan dan kesejahteraan anak secara berkelanjutan.

Ancaman lainnya adalah masih rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap pentingnya perlindungan hak anak. Penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat anggapan bahwa kekerasan dalam pengasuhan merupakan bentuk pendisiplinan yang wajar, serta masih rendahnya keberanian masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Kondisi tersebut menyebabkan berbagai kasus kekerasan terhadap anak tidak

seluruhnya terungkap sehingga menghambat proses penanganan maupun pemulihan korban. Rendahnya partisipasi masyarakat juga menjadi tantangan dalam membangun budaya perlindungan anak yang melibatkan seluruh unsur masyarakat sebagai bagian dari sistem pencegahan.

Secara keseluruhan, ancaman terhadap implementasi Program Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Bekasi tidak hanya berasal dari faktor kelembagaan, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika sosial yang berkembang di masyarakat. Tingginya angka kekerasan terhadap anak, praktik perundungan, meningkatnya kekerasan berbasis digital, pertumbuhan penduduk yang pesat, serta masih rendahnya kesadaran masyarakat merupakan faktor-faktor eksternal yang dapat menghambat keberhasilan penyelenggaraan Program KLA apabila tidak diantisipasi secara komprehensif. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memperkuat strategi pencegahan melalui peningkatan kolaborasi lintas sektor, penguatan edukasi kepada masyarakat, optimalisasi perlindungan anak berbasis digital, serta pengembangan sistem pengawasan yang lebih responsif terhadap berbagai bentuk ancaman yang terus berkembang. Pendekatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan ketahanan sistem perlindungan anak sekaligus memperkuat keberlanjutan implementasi Program Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Bekasi.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, realisasi Program Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Bekasi telah menunjukkan perkembangan yang positif melalui adanya komitmen pemerintah daerah, dukungan regulasi, penguatan kelembagaan, serta kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Namun, implementasi program masih menghadapi beberapa

kendala, antara lain tingginya angka stunting, belum optimalnya koordinasi lintas sektor, dan belum meratanya penyediaan fasilitas ramah anak. Di sisi lain, dukungan kebijakan nasional, perkembangan teknologi informasi, serta potensi kolaborasi dengan dunia usaha dan masyarakat menjadi peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efektivitas program. Sementara itu, meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak, perundungan, kekerasan berbasis digital, dan rendahnya kesadaran masyarakat menjadi ancaman yang perlu diantisipasi. Oleh karena itu, strategi penguatan kolaborasi lintas sektor, optimalisasi pemanfaatan teknologi, peningkatan partisipasi masyarakat, serta pemerataan pelayanan berbasis hak anak menjadi langkah strategis dalam mewujudkan Kabupaten Bekasi sebagai Kabupaten Layak Anak yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). *Collaborative governance in theory and practice. Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bekasi. (2025). *Kabupaten Bekasi dalam Angka 2025*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Bekasi.
- Bakhri, S., Herawati, C., & Nuroniyah, W. (2020). Prospek dan tantangan Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Cirebon. *YINYANG: Jurnal Studi Islam, Gender, dan Anak*, 15(2).
- Elizabeth, A., & Hidayat, Z. (2016). Implementasi Program Kota Layak Anak dalam upaya pemenuhan hak-hak anak di Kota Bekasi. *Journal of Public Policy and Management Review*, 5(2).
- Hardjaloka, L. (2014). Studi penerapan *e-government* di Indonesia dan negara lainnya sebagai solusi pemberantasan korupsi di sektor publik. *Jurnal RechtsVinding*, 3(3), 435–452.
- Jehudat, Novaria, & Soesiantoro. (2024). *Collaborative governance dalam implementasi Kabupaten/Kota Layak Anak. Journal of Governance and Public Administration*.
- Nurhanisah, & Maifizar, A. (2025). Dampak implementasi Kabupaten Layak Anak (KLA) dalam upaya perlindungan anak di Kabupaten Aceh Barat. *Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi)*, 19(1).
- Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.
- Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak.
- Pemerintah Kabupaten Bekasi. (2024). *Pemkab laporkan hasil pelaksanaan 8 aksi konvergensi penurunan stunting Kabupaten Bekasi Tahun 2023*.
- Pemerintah Kabupaten Bekasi. (2025). *Pemkab Bekasi targetkan penurunan stunting ke angka satu digit*.
- Rahmawati, I., & Wahyuni, S. (2024). Implementasi kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Klaten (Studi kasus pada anak yang membutuhkan perlindungan khusus). *Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik*, 8(1), 51–63.
- Ratna Dewi, & Sri Dwi Friwanti. (2023). Implementasi pembentukan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kabupaten Aceh Barat.
- Sani, S. A. I., & Dwiono, S. (2025). Implementasi kebijakan Kabupaten Layak Anak dalam perspektif perlindungan hak anak. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*.
- Siskasari, R., & Darumurti, A. (2021). Implementasi kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak melalui kolaborasi pemerintah dan stakeholder. *Journal of Public Policy and Administration*.